

**ANALISIS PEMBINGKAIAN BERITA PEMINDAHAN IBU KOTA
INDONESIA DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID PERIODE
1-14 MEI 2019**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Sri Eka Novi Astuty

NIM : 11730025

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Sri Eka Novi Astuty

NIM : 11730025

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Public Relation*

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini ssaya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Yang menyatakan,



Sri Eka Novi Astuty

NIM : 11730025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING
FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Eka Novi Astuty
NIM : 11730025
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul :

**PEMBINGKAIAN BERITA PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA DI
MEDIA**
(Analisis di Detik.com dan Republika.co.id Periode 1-14 Mei 2019)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2019

Pembimbing

Lukman Nusa, M.I.Kom
NIP: 19861221 201503 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-324/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBINGKAIAN BERITA PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA DI
DETIK.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID PERIODE 1-14 MEI 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI EKA NOVI ASTUTY
Nomor Induk Mahasiswa : 11730025
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lukman Nusa, M.I.Kom.
NIP. 19861221 201503 1 005

Penguji I

Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I, M.A.
NIP. 19840516 201503 2 001

Penguji II

Fajar Iqbal, S.Sos., M.Si
NIP. 19730701 201101 1 002

Yogyakarta, 26 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dekan



Dr. H. Hamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Keluarga Besar dan Almamater Kebanggaan

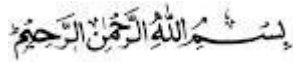
Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah putus, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di hari akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S. Sos selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Drs. Siantari Rihartono, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Lukman Nusa, M. Ikom selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti dengan begitu sabar,
4. Ibu Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I, M.A selaku Dosen Penguji I yang banyak membantu dan mengarahkan peneliti,
5. Bapak Fajar Iqbal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji II yang banyak mengarahkan peneliti,
6. Ibu Diah Ajeng Purwani, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar menghadapi peneliti dan banyak sekali membantu peneliti,
7. Bu Niken, Pak Mahfud, Pak Rama serta Segenap Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, yang selalu memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menempuh bangku perkuliahan,
8. Segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

9. Kedua orang tua, Bapak Bintang Bawono dan Ibu Turyulianingsih, Dek Bangkit, Tante Upi, dan Mbah Kakung Putri yang selalu sabar menghadapi peneliti dan tidak pernah berhenti memberikan do'a dan dukungannya,
10. Shaum, Odonk, Fuad, Rama, Yoga, Qanita, Desita, Bobby, Idris, Adi, Ifa, Putri, Afi, Aish, Wikan, Ma'ruf, Hari, Jeqi, Ema, Meilan, Rozad, Aghni, Ali, Mbak Ika, Ochel, Esti, Ikasoh, Mila, Luthfi 2015, Mas Hendro, Mas Rosyid, Mas Ghundi, teman-teman KOMA, Ikom B dan C angkatan 2011 dan 2012, yang tidak pernah bosan memberi masukan, dukungan, dan kepercayaan kepada peneliti, terima kasih banyak karena telah percaya,
11. Untuk Bapak Heru Prayoga, Anak Arsene, dan Anak Keanu, *i love you*,

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan lapang dada.

Yogyakarta, 17 Juli 2019

Peneliti,

Sri Eka Novi Astuty

NIM : 11730025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	17
1. Berita	17
2. Jurnalisme Online	19
3. Ideologi Media	20
4. Realitas Media	21
5. Framing	22
G. Kerangka Berpikir	27

H. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Subjek dan Objek Penelitian	29
3. Jenis Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Analisa Data	31
6. Metode Keabsahan Data	31
BAB II GAMBARAN UMUM	33
A. Profil Detik.com	33
B. Profil Republika.co.id	36
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Hasil Olah Data	42
B. Diskusi Teori	134
1. Analisis Framing	134
2. Realitas Media	138
3. Ideologi Media	148
BAB IV PENUTUPAN	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Waktu Penerbitan Berita Pernyataan Fadli Zon	51
Gambar 2 : Waktu Penerbitan Berita Bantahan Erick Thohir	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Ini	14
Tabel 2 : Definisi Framing Menurut Tokoh	23
Tabel 3 : Kerangka Berpikir	27
Tabel 4 : Contoh Berita yang akan Diteliti	29
Tabel 5 : Skema Framing Model Pan dan Kosicki	31
Tabel 6 : Daftar Artikel Berita yang Diteliti	42
Tabel 7 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 1	44
Tabel 8 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 2	48
Tabel 9 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 3	54
Tabel 10 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 4	60
Tabel 11 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 5	65
Tabel 12 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 6	71
Tabel 13 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 7	75
Tabel 14 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 8	80
Tabel 15 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 9	86
Tabel 16 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 10	91
Tabel 17 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 11	94
Tabel 18 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 12	99
Tabel 19 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 13	103
Tabel 20 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 14	107
Tabel 21 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 15	111
Tabel 22 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 16	115
Tabel 23 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 17	118
Tabel 24 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 18	122
Tabel 25 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 19	126
Tabel 26 : Analisis Pan Kosicki Pada Artikel 20	130

ABSTRACT

Capital relocation of Indonesia has become news an issue that lead to pros and cons in the midst of the on going election. News about capital relocation of Indonesia was widely reported by several online media, including Detik.com and Republika.co.id. Most mainstream media stood for the incumbents. Jokowi-Ma'ruf's success team tend to be a media giant that created difficulties in finding media that was contradicted to government's discourse of capital relocation. This matter causes researcher need to examine pro media, in terms of their alignments.

This research is "News Framing about Capital Relocation of Indonesia in the Online Media" aims to discover how Detik.com and Republika.co.id framed the news of capital relocation of Indonesia by periods of May 1-14, 2019. Researcher specify that period because at the end of April 2019, President Joko Widodo held a limited meeting discussing some plan to move the capital. This shows the government's seriousness in handling this plan. During this period, the society was focused on the result of the election quick count, but the issue about capital relocation was highlighted again by the media.

The research method that used in this study was was qualitative descriptive with the method of framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. Pan Kosicki's analysis method consists of four structures; syntactic, script, thematic, and rhetorical structures. The theory used to triangulate this research theory is media ideology and media reality. This research concludes that Detik.com and Republika.co.id show their alignments towards capital relocation of Indonesia in a different way. Detik.com shows its alignments through news that contains objections to counter news. Whereas Republika.co.id shows its alignments by building an understanding of the importance of capital relocation.

Keyword : capital relocation of Indonesia, online media, media ideology, media reality, framing analysis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan kita untuk memperoleh informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Bahkan tidak ada informasi yang tidak dapat dijangkau dengan pandangan kita, ini membuktikan bahwa semakin derasnya laju perkembangan teknologi semakin deras pula informasi yang dapat dijangkau. Hal itu dapat kita rasakan betapa cepatnya kita dapat menerima informasi dari seluruh belahan dunia melalui media massa. Setiap informasi yang ada diharapkan sesuai dengan fakta, dalam Surah Al-baqarah ayat 42 disebutkan:

 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur-adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Namun, pemilik media massa memiliki kekuasaan besar terhadap isi media sehingga pemilik media seringkali ikut serta menentukan isi media. Shoemaker dkk (1996) dalam jurnal Pradita dkk (2018: 1161) mengatakan media massa di masa kini sudah tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan penguasa negara dan tengah menikmati kebebasannya. Namun, tidak berarti media massa bebas dari pihak tertentu. Pers sudah memiliki kebebasannya, namun harus menghadapi tantangan baru.

Dewasa ini, tantangan yang sungguh mengancam kebebasan pers Indonesia adalah intervensi pemilik media ke dalam ruang redaksi. Adanya pola

pikir yang terpusat pada segelintir penguasa, pengusaha, atau kontribusi keduanya yang kini marak berkembang di Indonesia, membuat media tidak lagi bebas, tetapi berada dalam kontrol kepentingan tertentu. Intervensi utamanya banyak dimainkan dalam penyajian konten media. Media hanya akan menyorot aspek yang dianggapnya penting dan mendukung kebijakan editorial media semata. Pengaruh dari dalam media biasanya tidak jauh dari kepentingan pemilik media, wartawan sebagai individu pekerja media, dan rutinitas organisasi media. Sementara pengaruh dari luar berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya (Pradita, dkk, 2018: 1161).

Kondisi tersebut selaras dengan teori ekonomi politik pada media. Baran (2010: 250) menyebutkan bahwa teori ekonomi politik media berfokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media. Sedangkan Castella dalam Sutrisno dan Putranto mengatakan media menjadi ruang politik, media menjadi penghubung warga negara dalam tindakan-tindakan politik mereka (2004: 68). Pemilik media seakan-akan mempunyai agenda khusus yang ingin disalurkan melalui redaksi media yang dikuasainya sehingga informasi yang dianggap menyimpang dapat dihalangi. Hal itu secara otomatis mempengaruhi objektivitas dan netralitas isi berita.

Media massa itu sendiri terdiri dari media cetak dan media elektronik. Salah satu media elektronik yang mudah diakses yaitu media online. Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Media online ini juga merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai “pelaporan fakta

atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online (Romli, 2012: 20).

Di Indonesia media online pada awalnya hanya memindahkan isi berita yang ada di surat kabar atau koran ke internet. Dengan kata lain desain berita versi cetak dengan online tidak ada perbedaan. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan adalah situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh beberapa fasilitas teknologi online dan berita di dalamnya (Severin dan Tankard, 2005: 463). Seiring berkembangnya zaman, media online memiliki desain dan konten tersendiri.

Salah satu berita di media online yang beberapa tahun terakhir banyak diperbincangkan adalah berita tentang rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi. Bahkan dalam salah satu cuplikan berita Presiden Jokowi mengatakan bahwa, ”Pemerintah sudah membahas rencana ini sejak tiga tahun terakhir” (Republika.co.id edisi 6 Mei 2019, diakses pada 25 Juni 2019 pukul 11.00). Memasuki tahun politik ini, Pemerintahan Jokowi saat ini sudah menyatakan serius untuk memindahkan ibu kota Indonesia, seperti dikutip dalam berita berikut:

Sebelumnya, di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) kemarin, Jokowi menegaskan pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota negara. "Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail

baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan," ujar Presiden. (Detik.com edisi Selasa, 7 Mei 2019, diakses 20 Mei 2019 pukul 08.25 WIB)

Terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut, sebenarnya ini sudah ada sejak lama, bahkan pernah dilakukan pada Era Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Situasi yang tak menentu menjelang Agresi Militer Belanda menyebabkan ibu kota harus segera diselamatkan. Barulah setelah dirasa aman, ibu kota dikembalikan ke Jakarta. Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara. Namun, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan dan hingga saat ini pun Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan.

Rencana pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi saat ini merujuk kepada Amerika Serikat yang menjadikan Washington DC sebagai ibu kota, sebelumnya ibu kota Amerika Serikat adalah New York yang kini jadi pusat bisnis terkemuka di dunia. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia hanya semata memindahkan pusat pemerintahan sehingga Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan keuangan, layaknya kota New York di Amerika Serikat. Contoh negara lain yang telah berhasil memindahkan ibu kota yaitu Malaysia yang telah memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Kemudian Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah sering diwacanakan di berbagai era pemerintahan sebelumnya. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan komitmen pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara," tutur Bambang.

Jika rencana ini terimplementasi, dia berharap Indonesia menjadi contoh baru bagi negara lainnya yang ingin memindahkan ibu kota. "Berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika, Australia punya kesuksesan masing-masing dalam memindahkan ibu kota negara. Begitupun dengan Indonesia, jika nanti jadi memindahkan ibu kota negara, harus ada nilai-nilai penting yang kita berikan kepada dunia sebagai teladan," terang dia. (detik.com edisi 10 Mei 2019, diakses 21 Mei 2019 pukul 19.50 WIB)"

Pada tahun ini, masyarakat sedang banyak tertuju pada Pemilihan Presiden. Tetapi, pemerintah justru menunjukkan kemantapannya dalam menangani rencana pemindahan ibu kota ini. Bahkan jika dilihat dari cuplikan berita di atas, Pemerintah Jokowi terlihat begitu mantap bahwa pihaknya dapat melaju ke periode kedua, padahal saat ini sedang ramai dibicarakan kecurangan dalam Pemilihan Presiden. Rencana pemerintah tersebut secara otomatis mendapat berbagai respon tidak hanya dari ahli dan pihak terkait lainnya, tetapi juga dari masyarakat di media online. Contoh pro kontra tersebut tercantum dalam kutipan artikel berikut:

Wacana pemindahan ibu kota ini pun banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemindahan ibu kota ini akan menimbulkan sejumlah dampak.

Menurutnya, pemindahan ibu kota ini akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, total biaya pembangunan ibu kota baru ini akan memakan anggaran Rp 466 triliun. Bhima memperkirakan akan terjadi pembengkakan biaya akibat spekulasi tanah. (republika.o.id edisi 2 Mei 2019, diakses 21 Mei 2019 pukul 20:05 WIB).

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan rencana pemindahan ibu kota di tengah banyaknya isu yang bergejolak ini menarik peneliti untuk melihat seperti apa beritanya dibingkai oleh media. Tidak hanya itu, sudah muncul kecurigaan warganet bahwa ini mungkin adalah pengalihan isu saja. Meskipun Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa ini sudah direncanakan sejak tiga tahun terakhir.

Peneliti memilih dua media online yang akan diteliti yaitu detik.com dan republika.co.id. Pemilihan detik.com untuk dijadikan subjek penelitian ini karena portal berita ini pro dengan pemerintah. Sedangkan republika.co.id dipilih karena visinya yang menyuarakan suara umat, bukan suara rakyat, tetapi spesifik pada suara umat muslim. Berdasarkan perbedaan ideologi dan faktor kepemilikan media, objektivitas, netralitas, dan imparialitas keduanya memiliki kecenderungan berbeda. Sejauh mana ideologi mereka mempengaruhi isi berita yang berkaitan dengan pemerintahan ini. “Proses pemberitaan media di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan proses politik yang berlangsung dan akumulasi modal yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Ini merupakan proses interplay, di mana proses ekonomi politik dalam media akan membentuk dan dibentuk melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi media itu” (Alfarabi, 2010:1).

Perbedaan pandangan kedua media tersebut juga bisa dilihat dari cuplikan artikel terkait anggaran pemindahan ibu kota, sebagai berikut:

“Sementara itu, terkait anggaran pemindahan ibu kota, Amali meyakini pemerintah pasti telah merencanakan anggaran dengan saksama. Menurut dia, anggaran tersebut juga tidak akan direalisasi dalam satu tahun anggaran.

“Yang pasti akan dibagi *multiyears* dalam beberapa kali APBN. Pengkajian ada di pemerintah. Kalau pemerintah sudah menghitungnya, saya yakin itu bisa dilaksanakan,” pungkasnya (detik.com edisi 9 mei 2019, diakses pada 25 Juni 2019 pukul 22:50).”
Sementara itu, berita di republika:

“Berdasarkan catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 323 hingga Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa. Nirwono berpendapat, ketimbang memindahkan ibu kota, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan wilayah lain. "Akan lebih baik jika dana itu kita gunakan untuk mengembangkan kota-kota, baik itu di luar Jabodetabek, artinya masih di Jawa, atau pun pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa," ujar Nirwono saat dihubungi, Rabu (1/5) (republika.co.id edisi 1 Mei 2019, diakses pada 25 Juni 2019 pukul 22:53).”

Kedua media tersebut memiliki pemaparan yang berbeda terkait anggaran dalam pemindahan ibu kota. Menurut artikel di detik.com pemerintah telah merencanakan anggaran dengan seksama. Sedangkan menurut artikel republika.co.id, akan lebih baik jika anggaran untuk pemindahan ibu kota digunakan untuk pengembangan wilayah. Perbedaan pemaparan oleh kedua media tersebut tidak terlepas dari peran wartawan. Dalam membingkai berita, wartawan merupakan agen pembentuk realitas. Realitas bukanlah sesuatu yang berada di luar yang objektif, yang benar, yang seakan-akan ada sebelum diliput oleh wartawan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses kontruksi berlangsung (Eriyanto, 2011: 35). Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan pendapat di antara dua portal berita.

Periode berita yang diambil peneliti adalah rentang antara 1-14 Mei 2019. Karena pada akhir bulan April 2019 telah dilaksanakan rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi mengundang

sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi membahas rencana pemindahan ibu kota (detik.com edisi 29 April 2019, diakses pada 26 Juni 2019 pukul 05.33). Dengan kata lain, rencana pemindahan ibu kota ini semakin serius dibahas oleh pemerintah. Selain itu, karena cukup banyaknya artikel berita tentang pemindahan ibu kota yang dilakukan pada rentang waktu tersebut. Pada periode tersebut masyarakat juga sedang banyak difokuskan pada perhitungan cepat hasil pemilu, namun berita pemindahan ibu kota kembali muncul secara rutin setiap hari pada rentang waktu tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “ANALISIS PEMBINGKAIAN BERITA PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID PERIODE 1-14 MEI 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana media online detik.com dan republika.co.id membingkai berita tentang pemindahan ibu kota Indonesia pada periode 1-14 Mei 2019?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian berita terkait pemindahan ibu kota Indonesia di media online detik.com dan republika.co.id pada periode 1-14 Mei 2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti terutama dalam bidang analisis framing dan pemberitaan seputar pemindahan ibu kota di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan atau referensi tentang analisis framing di media online.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penggambaran pembingkai berita oleh media online.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema atau analisis yang sama.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada media dalam menjaga objektivitas suatu berita.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menjadikannya sebagai bahan tinjauan pustaka, sehingga peneliti dapat membandingkan dan membedakan dengan penelitian-penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustakan peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Nur Fuadi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Judul yang diangkat adalah **RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT FREEPORT DALAM BIINGKAI SURAT KABAR** (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Berita Harian Kompas Bulan Januari 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan *frame* bagaimana Surat Kabar Harian Kompas membingkai pemberitaan seputar Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia periode 21-27 Januari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Oleh karena itu, akan dijabarkan perbedaan dari kedua penelitian ini :

- a. Media yang digunakan keduanya berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan media cetak Kompas, sedangkan penelitian ini menggunakan media online detik.com dan republika.co.id.
- b. Subjek. A. Nur Fuadi menggunakan Surat Kabar Harian Kompas sebagai subjeknya. Penelitian ini menggunakan media online detik.com dan republika.co.id.
- c. Objek. Keduanya memiliki objek yang berbeda, penelitian terdahulu menjadikan pemberitaan renegosiasi kontrak karya PT Freeport sebagai

objek. Sedangkan penelitian ini menjadikan pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia sebagai objek.

- d. Kelemahan. Penelitian ini hanya menggunakan satu media cetak untuk diteliti, sehingga bingkai berita yang dikaji hanya dari satu sisi saja, yang dalam penelitian ini hasilnya adalah kecenderungan membingkai tentang pihak pemerintah dari segi yang positif. Oleh karena itu, peneliti mencari perbandingan dengan menggunakan dua portal berita yang diteliti.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Putra Mahesa dari Universitas Pasundan pada tahun 2017. Judul yang diangkat adalah ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN AKSI SUPER DAMAI 212 DI MEDIA ONLINE KOMPAS DAN REPUBLIKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online Kompas dan Republika mengemas struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik pada pemberitaan Aksi Super Damai 212. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis framing.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan sama sama menggunakan media online. Oleh karena itu, akan dijabarkan perbedaan dari kedua penelitian ini :

- a. Subjek dari penelitian terdahulu adalah media online Kompas dan Republika dan subjek penelitian ini adalah media online detik.com dan republika.co.id

- b. Objek penelitian milik Widi Putera Mahesa adalah pemberitaan aksi super damai 212. Sedangkan objek penelitian ini adalah pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia.
 - c. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam dengan empat orang informan. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelusuran data online.
 - d. Kelemahan. Penelitian ini tidak mencantumkan pernyataan dari media ataupun ahli yang dapat menguatkan alasan peneliti dalam latar belakang masalah. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hal-hal yang mampu menguatkan latar belakang masalah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Judul yang diangkat adalah ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN TENTANG PEMBERITAAN *HOAX* RATNA SARUMPAET DI DETK.COM RENTANG WAKTU 3-31 OKTOBER 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pembingkai berita Ratna Sarumpaet di detik.com dan untuk mengetahui sejauh mana detik.com membingkai *Hoax* Ratna Sarumpaet.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama menggunakan analisis framing dan media online detik.com. Oleh karena itu, akan dijabarkan perbedaan dari kedua penelitian ini :

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan satu media online yaitu detik.com sedangkan penelitian ini menggunakan dua media online yaitu detik.com dan republika.co.id.
 - b. Analisis framing dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.
 - c. Objek penelitian milik Nurul Huda adalah berita *hoax* Ratna Sarumpaet , sedangkan objek penelitian ini adalah pemindahan ibu kota Indonesia.
 - d. Metode analisis keduanya juga berbeda karena menggunakan model analisis framing yang berbeda.
 - e. Kelemahan. Penelitian ini hanya menggunakan satu media online untuk diteliti, sehingga bingkai berita yang dikaji hanya dari satu sisi saja, yang dalam penelitian ini hasilnya adalah media online yang dipilih lebih menyudutkan pihak Ratna Sarumpaet dan pasangan calon Presiden yang didukungnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencari perbandingan dengan menggunakan dua portal berita yang diteliti.
4. Jurnal Penelitian Komunikasi oleh Rieka Mustika yang berjudul **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENEGENAI KASUS PEDOFILIA DI AKUN FACEBOOK** tahun 2017. Pada Jurnal ini mengungkapkan framing kasus pedofilia pada dua media online Kompas.com dan Republika online dengan menggunakan model Entman.

Persamaan dari penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan dua berita online. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada jurnal penelitian menggunakan dua media online Kompas.com dan Republika online sedangkan peneliti menggunakan detik.com dan Republika.com
- b. Analisis framing dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.
- c. Objek penelitian milik Rieka Mustika adalah berita kasus pedofilia di akun facebook, sedangkan objek penelitian ini adalah pemindahan ibu kota Indonesia.
- d. Kelemahan dari jurnal penelitian yang dibuat Rieka Mustika adalah belum adanya penjabaran bagaimana pemilihan artikel yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan artikel yang akan diteliti.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Ini

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Nur Fuadi	RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT FREEPORT DALAM BIINGKAI SURAT KABAR (Analisis Framing	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki - Metode penelitian deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Media : cetak dengan <i>online</i> - Subjek : Surat Kabar Harian Kompas dengan media online detik.com dan republika.co.id - Objek : Pemberitaan

		Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Berita Harian Kompas Bulan Januari 2015)	- Metode pengumpulan data penelusuran data <i>online</i>	renegosiasi kontrak karya PT Freeport dengan Pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia
2.	Widi Putra Mahesa	ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN AKSI SUPER DAMAI 212 DI MEDIA ONLINE KOMPAS DAN REPUBLIKA	- Menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki - Memilih berita dari media online - Metode penelitian deskriptif kualitatif - Salah satu media yang diteliti republika.co.id	- Subjek : Kompas dan Republika dan detik.com dan republika.co.id - Objek : pemberitaan aksi super damai 212. Dengan pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia. - Teknik pengumpulan data: observasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam dengan empat orang informan. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelusuran data online.
3.	Nurul Huda	ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN TENTANG PEMBERITAAN HOAX RATNA SARUMPAET DI DETK.COM	- Metode penelitian deskriptif kualitatif - Metode pengumpulan data penelusuran data <i>online</i> - Salah satu media yang	- Menggunakan satu media untuk diteliti dengan menggunakan dua media untuk diteliti. - Analisis framing : Model analisis framing Robert N.

		RENTANG WAKTU 3-31 OKTOBER 2018	diteliti detik.com	Entman, dengan Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. - Objek : pemberitaan <i>hoax</i> Ratna Sarumpaet dengan pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia. - Metode analisis keduanya juga berbeda karena menggunakan model analisis framing yang berbeda.
4.	Rieka Mustika	ANALISIS FRAMING PEMBERITAA N MEDIA ONLINE MENEGENAI KASUS PEDOFILIA DI AKUN FACEBOOK	- Sama-sama menggunakan dua portal berita, dimana salah satunya adalah republika.co.id	- Media online : kompas.com dan republika.co.id dengan detik.com dan republika.co.id - Analisis framing yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan model Entman, penelitian ini menggunakan model Pan Kosicki - Objek : kasus pedofilia dengan berita pemindahan ibu kota Indonesia

Sumber : Olahan Peneliti

F. Landasan Teori

Penelitian ini membutuhkan landasan teori sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada. Sehingga, landasan teori akan menjadi pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan memudahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Teori yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya:

1. Berita

Definisi berita menurut The New Grolier Webster International Dictionary yang dikutip kembali oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku “Jurnalistik Teori dan Praktek” menyebutkan :

(1) Current information about something that has taken place, or about something not known before; (2) News is information as presented by a news media such a paper, radio, or televisions; (3) News is anything or anyone regarded by a news media as a subject worthy of a treatment. (1) Informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya; (2) Berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media seperti surat kabar, radio, atau televisi; (3) Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan (Kusumaningrat, 2006 : 39).

Setiap berita memiliki nilai di dalamnya. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2006: 61-64) dalam bukunya menyebutkan bahwa nilai berita antara lain :

- a. Aktualitas (*Timelines*). Semakin aktual berita, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Tetapi adakalanya juga penemuan suatu peristiwa penting atau menarik yang usianya sudah bertahun-tahun dapat langsung menjadi berita utama.

- b. Kedekatan (*Proximity*). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Kian dekat dengan pembaca, kian menarik berita itu.
- c. Keterkenalan (*Prominence*). Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal akan menarik banyak pembaca. Nama-nama terkenal ini tidak harus diartikan orang saja. Tempat-tempat terkenal dan situasi-situasi terkenal juga memiliki nilai berita yang tinggi.
- d. Dampak (*Consequence*). Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, misalnya kenaikan harga BBM atau ilmuwan yang mengembangkan suatu vaksin baru, memiliki nilai berita tinggi.
- e. *Human Interest*. Berita yang memiliki daya tarik secara universal yang menarik minat orang, memiliki nilai berita tinggi. Beberapa unsur *human interest* misalnya ketegangan, ketidaklaziman, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia, hewan, dan humor.

Selanjutnya terdapat asal berita, yang menurut Eriyanto (2011: 226), merujuk kepada dari mana berita ini didapat oleh wartawan, apakah dari liputan langsung ataukah dari sumber lain. Berikut ini adalah sumber dari asal berita didapatkan :

- a. Liputan wartawan surat kabar. Berita didapatkan dari liputan langsung yang dilakukan wartawan (liputan, wawancara).
- b. Kantor Berita Indonesia
- c. Kantor Berita Asing

- d. Mengutip media dari Indonesia. Berita mengutip dari berita lain, baik surat kabar, radio, televisi, ataupun dotco yang berasal dari Indonesia.
- e. Mengutip media asing. Berita mengutip dari berita lain, baik surat kabar, radio, televisi, ataupun dotcom yang berasal dari luar negeri.
- f. Lainnya. Asal berita tidak dapat diidentifikasi secara jelas, atau di luar dari yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Jurnalisme Online

Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalistik tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita (Santana, 2005:137). Pavlik (2001) menyebut tipe baru jurnalisme ini sebagai “*contextualized journalism*”, karena mengintegrasikan tiga fitur komunikasi yang unik: kemampuan-kemampuan multimedia berdasarkan *platform* digital, kualitas-kualitas interaksi komunikasi-komunikasi *online*, dan fitur-fitur yang ditatanya (*customizable features*) (Santana, 2005: 137).

Terdapat enam ciri dari jurnalisme online (Andrew Boyd, 2001: 404), yaitu :

- a. *Realibility* (realibilitas), dalam perspektif jurnalistik, elemen realibilitas sangatlah dibutuhkan. Realibilitas sendiri merujuk pada konsistensi dari isi media.
- b. Internet, saat ini telah banyak digunakan oleh media televisi dan koran.

- c. *Content* (isi) berita dalam jurnalisme online jika tidak berbobot maka akan ditinggalkan khalayak.
- d. Isi berita yang dinamis. Para staf harus bersiaga untuk memperbarui berita yang sedang terjadi di belahan bumi manapun.
- e. Isi berita harus mendalam.
- f. Kecepatan, saat ini khalayak lebih menyukai sesuatu yang cepat dan instan.

3. Ideologi Media

Franz Magnis Suseno megartikan ideologi (1) ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai konotasi yang negative, sebagai claim yang tidak wajar atau tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan berpihak pada yang mempropagandakannya (penguasa). (2) ideologi dalam arti netral, diartikan sebagai sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar rohani sebuah gerakan kelompok sosial atau kebudayaan. (3) Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah. Dalam filsafat sosial yang berhaluan positivistic, segala pemikiran yang tidak dapat dites secara matematis-logis atau empiris, atau dengan kata lain tidak rasional, dapat disebut ideologis (Suseno, 2001: 230).

Media berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting bagi pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga isi media mencerminkan ideologi pihak yang berkuasa (Shoemaker dan Reese, 1996: 229). Ideologi dilihat sebagai salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi media itu bekerja (Shoemaker dan Reese, 1996: 223). Lebih lanjut McQuail (2000: 343) menyarankan, jika hendak meneliti bagaimana organisasi media memengaruhi pemilihan isi dan terutama dengan upaya untuk memengaruhi khalayak, kajian harus difokuskan pada pertanyaan bagaimana informasi berita direpresentasikan atau dikemas (*framed*). Sementara kerangka media merujuk pada format media.

4. Realitas Media

Niklas Luhmann mengemukakan pandangannya mengenai realitas media massa sebagai berikut:

We can speak of the reality of the mass media in a dual sense. The reality of the mass media, their real reality, as we might say, consist in their own operation. However we can speak of the reality of the mass media in another sense, that is, in the sense of what appears to them, or through them to others, to be reality. Put in Kantian terms: the mass media generate a transcendental illusion. According to this understanding, the activity of the mass media is regarded not simply as a sequence of operations, but rather as squance of observations or, to be more precise, of observing operations (Luhmann, 2000: 3&4).

Realitas media memiliki realitas ganda. Realitas dari media massa dan realitas itu sendiri yang dioperasikan oleh media. Media massa beroperasi secara tertutup. Namun kita dapat berbicara tentang realitas media massa dalam arti lain, yaitu dalam arti apa yang ditampilkan media, atau media dapatkan kemudian disampaikan sebagai kenyataan. Media massa menghasilkan ilusi transendental. Menurut pemahaman ini, aktivitas

media massa dianggap tidak hanya sebagai urutan operasional, tetapi media massa beroperasi dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2011: 26). Karena media berperan dalam mendefinisikan realitas, maka berita bukan lagi refleksi dari realitas, melainkan konstruksi dari realitas. Berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai (Eriyanto, 2011: 29).

5. Framing

Beterson (1955) sebagai orang yang pertama kali melontarkan gagasan mengenai framing, memaknai *frame* sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2012: 161-162). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Goffman (1974), yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2012: 162).

Selain sebagai teori, framing juga merupakan metode analisis teks, dimana karakter analisis framing berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Jika analisis isi kuantitatif menekankan pada isi (content) dari suatu pesan atau teks, analisis framing memperhatikan pembentukan pesan dari sebuah teks (Eriyanto, 2011: 11). Menurut Eriyanto (2011: 3) dalam bukunya mengungkapkan bahwa analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Berikut ini adalah beberapa pengertian framing menurut tokoh :

Tabel 2
Definisi Framing Menurut Tokoh

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan

	dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema intepretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber : Eriyanto, 2011: 77-79

Ada dua aspek penting dalam framing. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Aspek ini mengasumsikan bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Selalu ada kemungkinan dalam memilih fakta, yakni apa yang dipilih atau ditekankan dan apa yang dibuang. Artinya, fakta akan dilihat dari sisi tertentu dan berakibat pada pemahaman dan kontruksi fakta yang berbeda antara satu media dengan media lain. *Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan fakta, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Fakta yang sudah dipilih ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu (penempatan *headline*, pengulangan, pemakaian label,

generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya) (Eriyanto, 2011: 81).

Berdasarkan beberapa pengertian framing di atas, peneliti memilih framing model Zhongdang Pan dan Gerald M karena perangkat ini menghubungkan rutinitas munculnya berita terkait dengan strategi dan cara memproses berita. Kedua portal berita secara rutin memberitakan pemindahan ibu kota pada periode 1-14 Mei 2019. Merujuk pada definisi framing yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki maka kita melihat ada dua konsepsi dari framing yang saling berelasi. **Pertama**, dalam konsep psikologis. Konsep ini memberi penekanan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang memproses sejumlah informasi dan ditujukan ke dalam skema tertentu. **Kedua**, konsep sosiologis. Framing dalam konsep ini dimengerti sebagai proses seseorang mengklarifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas dirinya (Ishak, 2011: 120).

Model framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dibagi menjadi empat struktur besar. **Pertama**, struktur sintaksis; **kedua**, struktur skrip; **ketiga**, struktur tematik; **keempat**, struktur retorik (dalam Eriyanto, 2011: 295-304).

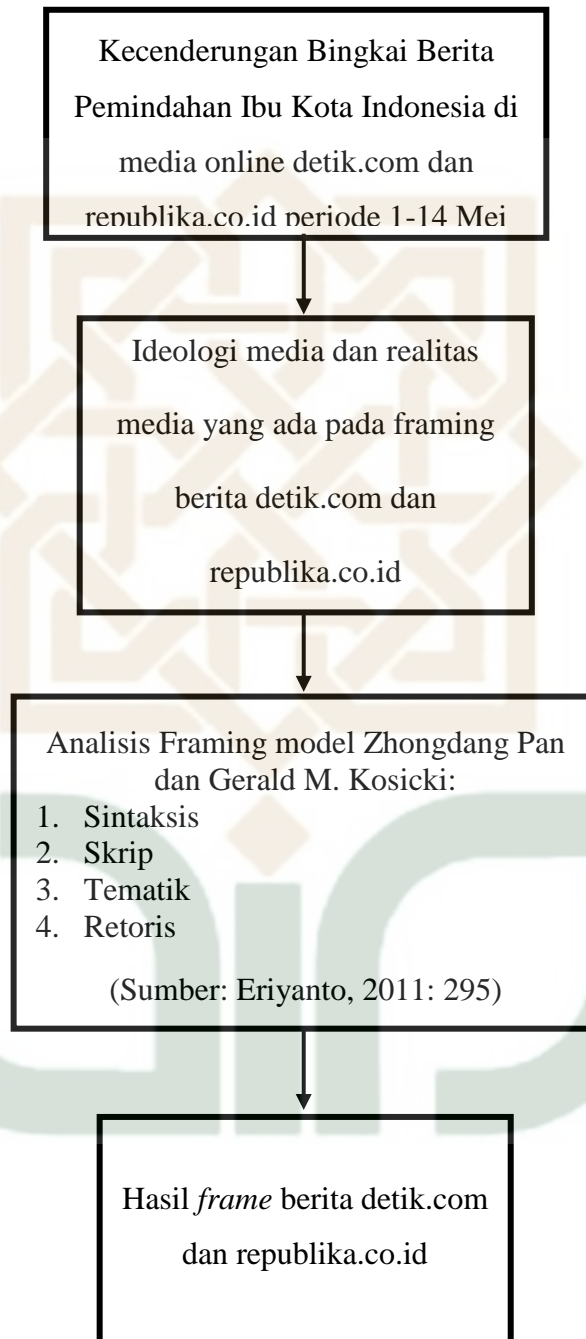
a. **Sintaksis**, dalam pengertian umum, sintaksis adalah susunan kata dalam frase atau kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada

pengertian susunan dan bagian berita – *headline, lead*, latar informasi, sumber, penutup – dalam suatu kesatuan teks berita secara keseluruhan.

- b. **Skrip**, bentuk umum dari penulisan berita atau skrip adalah 5W+1H (*who, what, where, when, why, + how*). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing yang penting.
- c. **Tematik**, kalau struktur sintaksis berhubungan dengan fakta yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagan berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Perangkat dari struktur tematik adalah detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti.
- d. **Retoris**, struktur retorik berelasi dengan bagaimana jurnalis menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan poin-poin yang menonjol pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Perangkat retorik terdiri dari leksikon, grafis, dan metafora.

G. Kerangka Berpikir

Tabel 3
Kerangka Berpikir Peneliti



Sumber: Olahan Peneliti

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah sistematis. Metode penelitian merupakan inti pokok dalam sebuah karya ilmiah. Fungsi penelitian itu sendiri adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka metodologi dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana paradigma penelitian hingga analisis data, adapun metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (*explanation*), tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007: 35).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena atas realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang konsisi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 38). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah media online yang akan diteliti, yaitu detik.com dan republika.co.id.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diangkat peneliti adalah berbagai bingkai berita yang memuat tentang pemindahan ibu kota Indonesia yang dimuat detik.com pada periode 1-14 Mei 2019. Karena pada tanggal akhir bulan April 2019 telah dilaksanakan rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota, dimana rencana pemindahan ibu kota ini semakin serius dibahas oleh pemerintah. Pada periode tersebut, masyarakat sedang terfokus pada perhitungan cepat pemilu, namun isu pemindahan ibu kota kembali menjadi sorotan. Selain itu, karena cukup banyaknya pemberitaan yang dilakukan pada rentang waktu tersebut. Berita-berita itu diantaranya:

Tabel 4
Contoh Berita yang akan Diteliti

No.	Judul Berita		Tanggal Terbit
	Detik.com	Republika.co.id	
1.	Erick Thohir Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu	Pengamat: Jakarta Masih Mampu Jadi Ibu Kota	1 Mei 2019

2.	Kaltim Jadi Calon Ibu Kota Baru, Jokowi: Fasilitas Mendukung	Presiden: Infrastruktur Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota	7 Mei 2019
3.	TKN Milenial: Ibu Kota Baru Harus Instagramable	Pemerintah Awasi Harga Tanah di Area Calon Ibu Kota Baru	14 Mei 2019

Sumber : Olahan Peneliti

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau subjek penelitian (Moleong, 2010:157). Penelitian ini menggunakan data primer berupa teks berita yang berhubungan dengan berita pemindahan ibu kota Indonesia yang dimuat di media online detik.com dan republika.co.id pada periode 1-14 Mei 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi atau mendukung data primer guna melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni berbagai literatur seperti buku, laporan atau jurnal, koran, dan sumber berita lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelusuran data online. Menurut Bungin (2007: 125) metode

penelusuran data online merupakan cara penelusuran data dengan media online seperti internet. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan informasi online berupa data dengan cepat, mudah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Data online yang dikumpulkan adalah teks pemberitaan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia di media online detik.com dan republika.co.id dalam periode 1-14 Mei 2019. Berita yang akan diteliti dipilih menggunakan *purrrposive sampling*. Masing-masing portal berita dipilih sepuluh berita yang diteliti karena ada banyak berita yang cenderung memiliki inti yang sama, sehingga bisa disederhakan lagi jumlahnya menjadi sepuluh. Berita yang dipilih merupakan berita yang mewakili isi dari bingkai berita di masing-masing portal media.

5. Metode Analisis Data

Analisa data akan dilakukan peneliti setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik analisa framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan skema framing sebagai berikut :

Tabel 5
Skema Framing Model Pan dan Kosicki

No.	Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
1.	SINTAKSIS Cara Wartawan Menyusun Fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan, Sumber, Pernyataan, Penutup</i>
2.	SKRIP Cara Wartawan Mngisahkan Fakta	2. Kelengkapan Berita	5W+1H
3.	TEMATIK Cara Wartawan Menulis Fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

		6. Kata Ganti	
4.	RETORIS Cara Wartawan Menekankan Fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, Idiom, Gambar / Foto, Grafik

Sumber : Eriyanto, 2011: 295

6. Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data yang dipakai adalah teknik triangulasi. Moleong berpendapat bahwa triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (2010: 178). Empat macam triangulasi yaitu Teknik yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2010: 178).

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2010: 331). Triangulasi dengan teori yakni untuk membandingkan informasi yang diperoleh dengan berbagai perspektif teori untuk menghindari subjektivitas peneliti, teori yang digunakan adalah ideologi media dan realitas media.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian analisis yang telah dilakukan secara bertahap, maka peneliti menarik kesimpulan terkait pembingkain berita pemindahan ibu kota oleh detik.com dan republika.co.id periode 1-14 Mei 2019, bahwa kedua media tersebut menunjukkan keberpihakannya dengan cara yang berbeda. Detik.com menunjukkan keberpihakan terhadap pemindahan ibu kota dengan menjadi media yang berusaha menyanggah dan menutup pernyataan yang kontra dengan pernyataan yang pro. Pro dan kontra yang ditonjolkan terjadi antara petahana dan oposisi. Hal ini menunjukkan ideologi detik.com ada di pihak petahana yang berpihak pada pemindahan ibu kota. Detik.com menjadi media yang memberikan konfirmasi atas pemberitaan pemindahan ibu kota.

Sedangkan republika.co.id menunjukkan keberpihakannya dengan menerbitkan berita terkait tahapan yang sudah dijalani pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Republika.co.id lebih banyak menunjukkan pihak kontra dari ahli, bukan oposisi seperti yang dilakukan detk.com. Selain itu, republika.co.id tidak menunjukkan sanggahan terhadap artikel yang kontra seperti yang dilakukan detik.com. Republika.co.id menunjukkan keberpihakannya dengan tetap berpegang pada ideologi bahwa pihaknya adalah media yang dibangun atas upaya dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia.

Cara penulisan berita kedau media ini juga berbeda. Detik.com menggunakan banyak kutipan sumber untuk menunjukkan bahwa berita

tersebut bukan hanya pendapat wartawan semata. Sedangkan republika.co.id lebih banyak menuliskan penjabaran wartawan dengan memasukkan beberapa kutipan sumber yang dianggap menguatkan.

B. Saran

Penelitian ini masih belum sempurna, sehingga tidak banyak saran yang bisa peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Masyarakat hendaknya lebih teliti dalam dan memahami suatu berita. Karena realita yang ada diberita mampu menggiring opini masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk lebih jeli dalam menganalisa berita yang akan ditelitinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an digital versi 3.2

- Akbar, Nawir Arsyad. 2019. "Pengamat: Jakarta Masih Mampu Jadi Ibu Kota". <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasiona> dalam republika.co.id diakses pada 25 Juni 2019 pukul 22:53.
- Alfarabi. 2010. "Kajian Komunikasi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Media". Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Australia, ABC 2019. "Canberra dan Tantangan Memindahkan Ibu Kota Negara". <https://news.detik.com> dalam detik.com diakses pada 21 Mei 2019 pukul 19:50.
- Baran, Stanley J & Davis Dennis, K. 2010. *Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Boyd, Andrew. 2001. *Broadcast Journalism : Techniques of Radio and Television News*. Melbourne : Focal Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Detik, 2019. "Redaksi". <https://www.detik.com>, diakses pada 28 Juni 2019 pukul 20:00.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang.
- Erwanti, Marlinda Oktavia. 2019. "DPR Akan Bentuk Pansus Pemandangan Ibu Kota". <https://news.detik.com/berita/d-4543044> diakses pada 25 Juni 2019 pukul 22:50.
- Fuadi, A. Nur, 2015. "Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport dalam Bingkai Surat Kabar (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Berita Harian Kompas Bulan Januari 2015)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Group, Mahaka, 2017. Laporan Tahunan 2017 Annual Report. Jakarta: JAK-TV.CO.ID.

- Huda, Nurul, 2019. "Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Pemberitaan *Hoax* Ratna Sarumpaet di Detik.com Rentang Waktu 3-31 Oktober 2018". Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan ampel, Surabaya.
- Ishak, Aswad. 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Aspikom.
- Jordan, Ray. 2019. "Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota". <https://news.detik.com/berita/d-4529143> dalam detik.com diakses pada 26 Juni 2019 pukul 05.33.
- Jordan, Ray 2019. "Serius Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Bertolak ke Kalimantan". <https://news.detik.com> dalam detik.com diakses pada 20 Mei 2019 pukul 08:25.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama. 2006. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Luhmann, Niklas. 2000. *The Reality of the Mass Media*. Stanford: Stanford University Press.
- Mahesa, Widi Putera, 2017. "Analisis Framing Pemberitaan Aksi Super Damai 212 di Media Online Kompas dan Republika". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pasundan, Bandung.
- Marixcon, 2012. "Budi Darsono- Pendiri Detik.com, Media Online Terbesar di Indonesia". <https://www.maxmanroe.com/budiona-darsono.html>, diakses pada 20 Juli 2019 pukul 19:00.
- McQuail, Denis. 2000. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustika, Rieka. 2017. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook". Jurnal. Puslitbang Aptika IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis.
- Pradita, Elfira, dkk. 2018. "Jurnal Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu". Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Republika, 2018. "Anniversary Republika.co.id". <https://www.republika.co.id/page/anniversary> yang diakses pada 28 Juni 2019 pukul 21:00.

- Republika, 2019. "Dari Redaksi". <https://www.republika.co.id>, diakses pada 28 Juni 2019 pukul 21:25.
- Retaduari, Elza Astari, 2019. "Berkarya Minta Jokowi Setop Wacana Pemindahan Ibu Kota: Tak Terlalu Urgen". <https://news.detik.com> dalam detik.com diakses pada 22 Mei 2019 pukul 19:50.
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa.
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saputri, Dessy Suciati. 2019. "Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Dibahas Serius 3 Tahun Terakhir". <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum> dalam [republika.co.id](https://www.republika.co.id) diakses pada 25 Juni 2019 pukul 11:00.
- Severin & Tankard, Werner J & James W. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Shoemaker & Reese, Pamela J & Stephen D. 1996. *Mediating The Message*. New York: Longman Publisher.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suseno, Franz Magniz. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2004. *Hermeneutika Pascakolonial; Soal Identitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wulandari, Retno. 2019. "Darmin: Pemindahan Ibu Kota Masih Tahap Evaluasi". <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pqvj2i370/darmin-pemindahan-ibu-kota-masih-tahap-evaluasi> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 20:05.

Rabu 01 Mei 2019, 16:17 WIB

Fadli Bilang Pemindahan Ibu Kota Pengalihan Isu: Omong Kosong Jokowi!

Samsudhuha Wildansyah - detikNews



Fadli Zon (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota RI merupakan upaya pengalihan isu. Ia pun menyebut rencana itu hanya omong kosong belaka.

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu ya. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Dukung Ibu Kota RI Pindah: Jakarta Crowded!

Menurut Fadli, isu pemindahan ibu kota RI sudah pernah bergulir, tetapi tidak kunjung terwujud. Maka, jika rencana tersebut benar, Fadli meminta pemerintah mempersiapkannya matang-matang.

"Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Anggaran

Terkait keputusan pemindahan ibu kota RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif. Saat ini, sudah ada 3 kandidat lokasi ibu kota baru.

"Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

"Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," imbuhnya.

(sam/tsa)



Rabu 01 Mei 2019, 16:36 WIB

Erick Thohir Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu

Adhi Indra Prasetya - detikNews



Erick Thohir (Foto: Lisye/detikcom)

Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, membantah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota RI merupakan upaya pengalihan isu. Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota RI telah bergulir sejak lama.

"Kalau dibilang pengalihan isu nggak *lah*. Masalah ibu kota ini kan sudah dibicarakan jauh-jauh hari," kata Erick di Epiwalk epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Fadli Bilang Pemindahan Ibu Kota Pengalihan Isu: Omong Kosong Jokowi!

Lagipula, kata Erick, pemindahan ibu kota RI ke luar Pulau Jawa tidak akan dilakukan tiba-tiba. Menurutnya, prosesnya bisa memakan waktu hingga 20 tahun.

"Kalau dilihat juga ide pengalihan ibu kota ini juga kan bukan sekarang, tapi akan mulai diputuskan sekarang. Pembangunannya perlu 15-20 tahun ke depan," sebut dia.

Karena itu, Erick mengatakan keputusan pemindahan ibu kota ini menjadi tugas presiden-presiden di masa mendatang. Ia mengingatkan soal pentingnya pembangunan berkelanjutan.

"Tentu presiden ke depan yang menjadi satu kesatuan pembangunan. Ini yang bagus, walaupun nanti presiden-presidennya ganti, tapi blueprint dari sebuah bangsa nggak boleh berubah," ujar Erick.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Dukung Ibu Kota RI Pindah: Jakarta Crowded!

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota RI merupakan upaya pengalihan isu. Ia pun menyebut rencana itu hanya omong kosong belaka.

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu ya. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

(tsa/imk)



Kamis 02 Mei 2019, 07:39 WIB

Ngabalin ke Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bukan Bercanda Bagi Jokowi

Noval Dhwinuari Antony - detikNews



Foto: Tenaga Ahli Utama Kedepuitan IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (Noval-detikcom)

Jakarta - Staf Ahli Kedepuitan IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menepis pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut wacana pemindahan ibu kota negara hanya omong kosong dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ngabalin menegaskan Jokowi tidak main-main dengan wacana pemindahan ibu kota negara.

"Intinya adalah keberanian pemerintah, intinya adalah keberanian presiden (untuk memindahkan ibu kota negara), itu saja. Dan kalau seperti yang dibilang Pak Jokowi pasti (akan jadi), infrastruktur yang selama ini (dibangun) juga diputuskan presiden, bukan bercanda bagi seorang Jokowi," ujar Ngabalin saat dihubungi, Rabu (1/5/2019).

Ngabalin juga menepis pernyataan Fadli yang mengatakan isu pemindahan ibu kota RI sudah pernah bergulir, tetapi tidak kunjung terwujud. Ditegaskan Ngabalin, pemerintah sejak beberapa waktu ke belakang justru tengah mempersiapkan dengan matang wacana pemindahan ibu kota, salah satunya dengan berbagai riset yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Saya itu pernah menjadi Pansus ibu kota negara. Saya pernah menjadi anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Negara, waktu saya di DPR 2004-2009. Artinya begini, baik dari Bappenas, baik dari teman-teman kampus, semuanya, ini bukan barang baru, sudah ada bentuk kegiatan yang cukup panjang dengan analisa ilmiah. Kan presiden juga tidak serta merta, tidak buta-buta kemudian membicarakan masalah ini kan," jelasnya.

Baca juga: Erick Thohir Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu

Ngabalin pun menyayangkan pernyataan Fadli yang dinilainya tidak memberikan ekspektasi bagus dengan wacana pemindahan ibu kota negara. Padahal rencana pemindahan ibu kota negara sudah digulirkan sejak zaman Presiden RI Soekarno.

"Fadli sudah harus punya satu kesadaran penting bahwa wacana pemindahan ibu kota negara itu adalah kebutuhan dari sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Jangan lupa bahwa Kota Jakarta ini kan selama ini menjadi ibu kota negara yang boleh dibilang sudah tidak mampu untuk menampung kemudian memberikan dukungan terhadap aktivitas masyarakat secara layak," ungkap Ngabalin.

Ngabalin mengatakan Jokowi sangat serius dengan rencana pemindahan ibu kota, karena Jakarta sebagai ibu kota negara sudah sudah over populasi. Hal ini dilakukan Jokowi untuk kepentingan jangka panjang. Dia juga memastikan wacana pemindahan ibu kota tidak ada kaitannya dengan banyaknya masalah di Jakarta.

"Pemindahan ibu kota negara itu tidak ada kaitannya dengan keruwetan masalah Jakarta. Tetapi kita bicara tentang amanat konstitusi yang di mana bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi penting, kenapa? karena distribusi itu penting," imbuhnya.

"Karena Jakarta itu sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan, Jakarta itu sebagai pusat negara-negara sahabat, Jakarta itu sebagai tempat pusat peredaran uang," lanjutnya.

Baca juga: Fadli Bilang Pemindahan Ibu Kota Pengalihan Isu: Omong Kosong Jokowi!

Sebelumnya, Fadli menyebut keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota RI merupakan upaya pengalihan isu. Isu pemindahan ibu kota RI sudah pernah bergulir, tetapi tidak kunjung terwujud.

"Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

(nvl/fdu)

Kamis 02 Mei 2019, 17:47 WIB

Fadli Zon Bilang 'Omong Kosong', Istana Ungkap Alasan Pindah Ibu Kota

Andhika Prasetya - detikNews



Moeldoko (Andhika Prasetya/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR **Fadli Zon** menyebut rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta merupakan pengalihan isu dan omong kosong. Istana menjelaskan alasan pemerintah ingin memindahkan ibu kota.

"Memang ini sesuatu yang perlu di-*refresh*. Karena keinginan memindahkan ibu kota sudah lama. Dan ini ada referensi yang bisa juga dipakai, seperti Brasil. Dan bekas ibu kota yang ditinggalkan dibangun dengan baik," ujar Kepala Staf Kepresidenan **Moeldoko** di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Fadli Bilang Pemindahan Ibu Kota Pengalihan Isu: Omong Kosong Jokowi!

Moeldoko mencontohkan negara lain yang sudah memindahkan ibu kota adalah Brasil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Hal seperti itulah yang akan diadopsi pemerintah.

"Kita ya boleh-boleh saja dong memikirkan itu. Kita ingin berubah. Pertanyaannya, kapan dan dananya dari mana, ya kalau sudah mulai dipikirkan, ada jalan keluarnya," ucap Moeldoko.

Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melihat sejauh mana kandidat ibu kota baru. Ibu kota baru direncanakan dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

"Presiden kemarin ingin melihat kajian dari Bappenas. Bappenas selama ini membuat kajian. Presiden ingin tahu sejauh mana kajian. Nanti keputusan berdasarkan kajian dan pandangan dari luar," jelas Moeldoko.

Baca juga: Ngabalin ke Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bukan Bercanda bagi Jokowi

Apakah ibu kota dipindah ke Pulau Kalimantan? Moeldoko tidak menjawab spesifik.

"Itu tidak bisa dispekulasikan seperti itu, nanti jadi spekulasi tanah," ujarnya.

Fadli sebelumnya menilai rencana memindahkan ibu kota hanya wacana isapan jempol untuk pengalihan isu. Menurutnya, isu pemindahan ibu kota pernah digulirkan tapi kemudian reda.

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu. Dulu juga begitu empat-lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

"Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

(dkp/imk)

Sabtu 04 Mei 2019, 13:46 WIB

Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, Sandiaga: It's Not the Time

Farih Maulana Sidik - detikNews



181 komentar



Cawapres Sandiaga Uno. (Rifdianto Nugroho/detik.com)

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan **pemindahan ibu kota** dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Cawapres Sandiaga Uno menilai wacana tersebut belum waktunya.

"*It's not the time. You have to ask the people* dan ini bukan suatu hal yang menurut saya mudah diputuskan dan buat saya, saya nggak layak berkomentar karena saya ingin kita fokus bicara tentang agenda kita untuk proses pemilu ini jujur dan adil," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Baca juga: [Apa Saja yang Akan Ada di Ibu Kota Baru RI?](#)

Sandiaga mengaku saat ini ingin fokus mengawal proses pemilu dengan jujur dan adil ketimbang menanggapi pemindahan ibu kota. Ia mengatakan ada saatnya rencana pemindahan ibu kota dibicarakan pada waktu yang tepat.

"Menurut saya, ada waktu yang tepat untuk berbicara tersebut dan disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, *cost*-nya, dan lain sebagainya disampaikan sebagai referendum karena seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya di mana. Itu etikanya seperti itu. Kenapa saya begini? Karena mengolah-olah kayak kurang isu *aja ditambah* isu seperti ini," paparnya.

Baca juga: [Istana: Bappenas Sudah 1,5 Tahun Kaji Pemindahan Ibu Kota](#)

Rencana pemindahan ibu kota kembali diangkat dalam rapat terbatas di kantor presiden yang dipimpin Jokowi. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota di luar Jawa, seperti faktor kepadatan penduduk dan potensi banjir.

Saat ini, Jokowi sudah mengantongi 3 kandidat ibu kota baru. Namun ia masih menunggu hasil lengkap kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bisa di Sumatera, tapi yang timur jauh, di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang. Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong," ujar Jokowi di PT KMK Global Sports 1, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

(dkp/hri)

Senin 06 Mei 2019, 17:58 WIB

Buka Puasa Bareng Fahri-Zulhas, Jokowi Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota

Ray Jordan - detikNews



Jokowi Gelar Bukber Bareng Pimpinan Lembaga Tinggi Negara (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta - Dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (**Jokowi**) menyinggung soal rencana pemerintah yang ingin memindahkan **ibu kota negara**. Jokowi menegaskan rencana tersebut adalah serius.

"Pada kesempatan yang baik ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Jokowi menegaskan rencana tersebut serius dikerjakan oleh pemerintah. Bahkn sejak tiga tahun lalu rencana itu sudah dibahas oleh Jokowi secara internal pemerintah.

"Kita serius dalam hal ini, karena sejak tiga tahun lalu sebetulnya ini telah kita bahas di internal. Dan 1,5 tahun lalu kami minta Bappenas lakukan kajian lebih detil baik dari sisi ekonomi, sosial politik dan juga dari sisi lingkungan," katanya.

Baca juga: Di Depan Zulhas Hingga Fahri, Jokowi Bersyukur Pemilu 2019 Lancar

Jokowi kemudian menjelaskan secara singkat kondisi di pulau Jawa. Saat ini jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 149 juta orang. Sementara itu di pulau Sumatera berjumlah 21 persen.

"Di Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua, Maluku baru 3 persen. Oleh sebab itu kami nantinya akan tindak lanjuti ini tentu saja dengan lembaga negara yang berkaitan dengan ini, baik dari sisi hukum maupun politisnya," terang Jokowi.

Baca juga: Fadli Bilang Pemindahan Ibu Kota Pengalihan Isu: Omong Kosong Jokowi!

Jokowi juga mengatakan posisi ibu kota saat ini yakni Jakarta berada pada kawasan 'ring of fire'. Selain itu banjir juga jadi ancaman.

"Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang kita tahu semuanya Jakarta berada di ring of fire, juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini. Kedua juga dari sisi ketersediaan air bersih. Ke depan ini akan jadi persoalan besar apabila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah penyediaan air," jelas Jokowi.

"Oleh sebab itu sekali lagi bahwa pemindahan ibu kota ini akan kita segera putuskan dan kami akan konsultasikan dengan lembaga terkait," imbuh Jokowi.

(jor/imk)

Senin 06 Mei 2019, 20:05 WIB

Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota Negara, Fahri Hamzah Usul ke Pulau Seribu

Ray Jordan - detikNews



Fahri Hamzah (Lamhot Artonang/detikcom)

Jakarta - Saat berbuka puasa bersama para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Jokowi menegaskan rencana memindahkan **ibu kota negara** adalah hal yang disetujui pemerintah. Wakil Ketua DPR **Fahri Hamzah** mengusulkan agar ibu kota negara dipindahkan ke Kepulauan Seribu, Jakarta.

Fahri mengatakan ikut memberi saran kepada pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Jika memang pemerintah serius, Fahri mengusulkan agar menggunakan konsep negara kemaritiman.

"Saya terus terang ya, kalau pemerintah serius, ini pemerintah serius ya, kalau mau dipakai sebagai momentum untuk menyampaikan ini (pemindahan ibu kota), karena bagaimanapun ini ada situasi menjelang akhir dari penghitungan suara. Tapi kalau serius, saya bilang, tadi saya *ngomong* juga sama Menteri Bappenas, pakailah konsep maritim," kata Fahri usai berbuka puasa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Fahri menilai sebaiknya ibu kota negara berada di wilayah pinggiran. Dia pun menyarankan untuk dipindahkan ke **Kepulauan Seribu, yang masih masuk wilayah DKI Jakarta**.

Baca juga: Buka Puasa Bareng Fahri-Zulhas, Jokowi Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota

"Justri ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilihlah seperti Pulau Seribu. Itu lebih masuk akal karena kita mau mendalami konsepsi negara maritim kan, jadi lebih bagus kalau kita memakai kepulauan sebagai konsep ibu kota kita," tuturnya.

Apalagi, kata Fahri, sudah ada lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Status lahan reklamasi itu dinilainya masih mengambang.

"Jadi nggak perlu disebutnya pindah, kaya Malaysia saja, ada Putrajaya sebagai kantor pemerintahan baru. Apalagi di Teluk Jakarta itu kan ada tanah reklamasi yang statusnya mengambang. Harusnya itu diselesaikan oleh pemerintah, lalu dijadikan bagian pengembangan wilayah baru di pesisir, karena kita menganut konsep negara maritim. Itu yang saya bilang, tadi saya bilang juga," jelasnya.

"Jadi nggak perlu jauh dari Jakarta karena ongkosnya akan jadi lebih mahal, itu yang saya bilang tadi," imbuh Fahri.

Baca juga: 4 Gubernur Calon Ibu Kota Baru Diundang ke Istana Presentasikan Daerahnya

Fahri mengaku memahami bahwa Jakarta merupakan peninggalan Presiden pertama RI Ir Sukarno. Hal ini dikuatkan dengan penyematan nama Daerah Khusus Ibu Kota yang diundangkan pada tahun 1961, sepulang Ir Sukarno dari kunjungannya ke Amerika Serikat.

"Jadi konsep DKI itu mengikuti Washington DC sebetulnya. Makanya, kalau kita membaca luas distrik Kolombia itu kan cuma 16x10 kilometer. Dan kalau kita tarik gedung DPR sampai ke sini kan lebih-kurang 10 kilometer, jadi sebenarnya sudah merupakan konsep Bung Karno tentang ibu kota. Apa lagi yang mau kita ubah? Tapi kalau mau bikin kantor, silakan cari dekat-dekat sini. Dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal," tutur Fahri.

"Usul saya, mumpung ini ada konsep maritim, *pindahin* saja ke pinggir dekat-dekat Pulau Seribu," sambungnya.

Fahri mengatakan usulan untuk dipindahkan ke luar Pulau Jawa tidak perlu. Meski demikian, ia yakin usulan dipindah ke luar Pulau Jawa itu baru sekadar wacana dari Jokowi.

"Nggak perlu menurut saya begitu. Tapi ini kan presiden baru lempar bola ya, mau digocek-gocek terlalu jauh rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ini, karena ini kan orang lagi menjelang proses akhir pemilu, pilpres kita kan, akan ada pengumuman KPU tanggal 22 (Mei 2019). Itu harus kita pegang dulu, jangan ke mana-mana," ucap Fahri. (jor/eltz)

Selasa 07 Mei 2019, 17:11 WIB

Berkarya Minta Jokowi Setop Wacana Pemindahan Ibu Kota: Tak Terlalu Urgen

Eliza Astari Retaduari - detikNews



Foto: Priyo Budi Santoso. (Rengga Sancaya/detikcom).

Jakarta - Partai Berkarya meminta petahana Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait untuk menyeting wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah diminta untuk mengurus hal-hal yang dinilai lebih urgen, seperti banyaknya petugas yang meninggal dalam Pemilu serentak 2019.

"Total 532 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal terdiri 440 KPPS, 92 Panwas, ribuan yang sakit. Ini merupakan pemilu yang paling mematikan dalam sejarah demokrasi kita. Ini bukan lagi persoalan intern KPU, tapi sudah menjadi perkabungan nasional," ujar Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Menurut Priyo, pemerintah seharusnya serius menangani fenomena banyaknya petugas yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, Jokowi diminta untuk tidak memprioritaskan wacana pemindahan ibu kota yang dianggap belum terlalu penting untuk saat ini.

Menurut Priyo, pemerintah seharusnya serius menangani fenomena banyaknya petugas yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, Jokowi diminta untuk tidak memprioritaskan wacana pemindahan ibu kota yang dianggap belum terlalu penting untuk saat ini.

Baca juga: [Serius Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Bertolak ke Kalimantan](#)

"Pemerintah mestinya serius, jangan berpangku tangan seperti ini, seolah tidak terjadi apa-apa. Kepada bapak Presiden Jokowi dan para elite politik di parlemen saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota atau hal-hal semacamnya yg tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini," ucap Priyo.

"Ada situasi mendesak yang mestinya serius dan segera ditangani oleh negara. Saya usulkan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen yang melibatkan ahli-ahli yang kredibel dan Komnas HAM. Itu untuk menjawab keragu-raguan publik akan adanya spekulasi yang meluas atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi," lanjut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

Baca juga: [Ratusan Petugas KPPS Wafat, MK: Jangan Salahkan MK soal Pemilu Serentak](#)

Mengusut soal kematian petugas selama pemilu dianggap Priyo menjadi hal yang urgen. Ini dinilainya menyangkut hak asasi manusia (HAM).

"Ini mengenai ratusan nyawa yang harus dijaga dan dihormati hak-hak asasi (HAM) nya. Innalillahi wa inna ilaihi rojuun," tegas Priyo.

(elz/tor)

Rabu 08 Mei 2019, 06:15 WIB

Berkarya Minta Jokowi Setop Wacana Pemindahan Ibu Kota, TKN: Harusnya Didukung

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews



Jakarta - Partai Berkarya meminta petahana Presiden **Joko Widodo (Jokowi)** dan pihak-pihak terkait untuk menyetop wacana pemindahan ibu kota. Tim Kampanye Nasional (TKN) **Jokowi-Ma'ruf Amin** heran dengan penolakan dari Partai Berkarya.

"Harusnya rencana pemindahan ibu kota ini didukung. Apalagi gagasan besar ini juga dicetuskan oleh Soekarno, disambung Pak Harto, dan terakhir oleh Pak SBY. Tapi gagasan besar itu tdk pernah jadi keputusan politik dan selanjutnya direncanakan dengan matang. Hanya di era periode Pak Jokowi, gagasan besar ini dengan tegas diputuskan," ujar Juru Bicara **TKN Jokowi-Ma'ruf Amin**, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (7/5/2019).

Baca juga: Berkarya Minta Jokowi Setop Wacana Pemindahan Ibu Kota: Tak Terlalu Urgen

Ace mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota bukan hal yang tiba-tiba dan tanpa kajian mendalam. Menurutnya, seharusnya semua pihak mendukung gagasan yang sudah diwacanakan sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang pemindahan Ibukota dari Jakarta tentu telah melalui proses pengkajian yang sangat mendalam. Saat ini DKI Jakarta kan menghadapi berbagai persoalan serius seperti banjir, kemacetan dan lain-lain. Di samping DKI Jakarta sudah menjadi pusat bisnis dan ekonomi terbesar di negara kita," katanya.

Politikus Golkar itu pun yakin wacana pemindahan ibu kota itu dapat dieksekusi. Ace yakin Jokowi akan mampu merealisasikan gagasan pemindahan ibu kota Indonesia itu.

"Melihat rekam jejak Pak Jokowi dalam empat setengah tahun ini, saya yakin gagasan besar itu akan bisa dieksekusi. Kekuatan Pak Jokowi adalah mampu menyelesaikan dan mewujudkan gagasan atau konsep yg sudah dibicarakan sebelumnya. Banyak pekerjaan besar seperti MRT, LRT, Jalan Tol yg mangkrak bisa diselesaikan dengan kepemimpinan pak Jokowi," tutur Ace.

"Kita bisa mencontoh negara tetangga. Malaysia memindahkan Ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Hal yang biasa. Apalagi Pak Jokowi yang merupakan Presiden terpilih memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pemerataan pembangunan Indonesia," imbuhnya.

Baca juga: Kaltim Jadi Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Fasilitas Mendukung

Sebelumnya, Partai Berkarya meminta petahana Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait untuk menyetop wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah diminta untuk mengurus hal-hal yang dinilai lebih urgen, seperti banyaknya petugas yang meninggal dalam Pemilu serentak 2019.

"Total 532 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal terdiri 440 KPPS, 92 Panwas, ribuan yang sakit. Ini merupakan pemilu yang paling mematikan dalam sejarah demokrasi kita. Ini bukan lagi persoalan intern KPU, tapi sudah menjadi perkabungan nasional," ujar Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (7/5).

(mae/ibh)

Selasa 14 Mei 2019, 16:37 WIB

TKN Milenial: Ibu Kota Baru Harus Instagramable

Arief Ikhsanudin - detikNews



Milenial Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berharap Ibu kota baru Indonesia dibentuk secara Instagramable. (Arief Ikhsanudin/detik.com)

Jakarta - Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) **Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin** berharap ibu kota baru Indonesia dibentuk secara *instagramable*. Ibu kota baru diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga nyaman untuk liburan.

"Tentu kalau saya pribadi nih sebagai orang muda yang suka buka *social media*, *pengin* ibu kota baru itu *instagramable*," ucap jubi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lathifa Al Anshori, dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota di Mata Milenial, di Rumah Pemenangan Jokowi -Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Canberra dan Tantangan Memindahkan Ibu Kota Negara

Lathifa mencontohkan ibu kota Amerika Serikat, Washinton, DC. Di sana, ada taman dengan bunga sakura mekar pada bulan tertentu.

"Ada pohon sakuranya mungkin, jadi mungkin di bulan April (bisa dinikmati masyarakat)," ucap Lathifa.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan konsep ibu kota jangan hanya menjadi pusat pemerintahan. Ibu kota juga harus menjadi tempat menarik untuk dikunjungi rakyat Indonesia.

"Mari kita visikan ibu kota baru kita itu bukan cuma tempat melaksanakan pemerintahan, tetapi juga menjadi tempat kita pelesir sekali-kali," kata Lathifa.

Baca juga: DPR akan Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, jubi TKN lainnya, **Tsamara Amany**, menyoroti masalah ketersediaan ruang terbuka hijau di Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Jakarta, katanya, tidak pernah mencapai kebijakan ruang terbuka hijau 30 persen.

"Jakarta tidak pernah memenuhi target ruang terbuka hijau karena sudah habis untuk gedung dan pusat ekonomi baru," ucap Ketua DPP PSI tersebut.

Maka, jika ibu kota dipindah, kantor pemerintahan lama menurutnya bisa dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi, lanjut Tsamara, Jakarta punya kecukupan ruang terbuka hijau untuk taman atau lainnya.

"Tapi kalau misalnya nanti gedung-gedung pemerintahan yang saat ini tidak ada lagi di Jakarta tapi pindah ke kawasan lain, itu akan memungkinkan gedung-gedung ini bisa jadi ruang terbuka hijau. Kita tahu Jakarta terbatas banget setengah mati," ucap Tsamara.

(aik/gbr)

Pengamat: Jakarta Masih Mampu Jadi Ibu Kota

Rabu 01 May 2019 16:45 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah



Pengamat tata kota, Nirwono Joga

Foto: Youtube

Butuh anggaran besar untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga menanggapi wacana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Menurut Nirwono, jika wacana itu direalisasikan, dipastikan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Baca Juga

JK: Jakarta akan Dijadikan Pusat Dagang dan Bisnis

Dampak Ekonomi Pindahan Ibu Kota Indonesia Dari Jakarta

Jakarta Memanas; Banjir dan Perlawanan Terhadap Neokolim

Berdasarkan catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 323 hingga Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di Luar Pulau Jawa.

Nirwono berpendapat, ketimbang memindahkan ibu kota, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan wilayah lain. "Akan lebih baik jika dana itu kita gunakan untuk mengembangkan kota-kota, baik itu di luar Jabodetabek, artinya masih di Jawa, atau pun pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa," ujar Nirwono saat dihubungi, Rabu (1/5).

Dengan adanya pembangunan di wilayah luar Jakarta, diharapkan dapat menarik minat warga daerah lain mencari mata pencaharian di kota tersebut. Karena menurut Nirwono, salah satu penyebab sejumlah permasalahan di Jakarta disebabkan oleh tingginya angka urbanisasi.

Ia mencontohkan, sejumlah kota di luar Pulau Jawa yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, seperti Kota Padang, Medan, dan Palembang. Selain itu, ada Kalimantan terdapat Kota Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin yang berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi.

Untuk Pulau Sulawesi, terdapat Kota Makassar, Manado, dan Kendari yang dapat menjadi pusat pembangunan. Bahkan di Pulau Papua, Kota Jayapura, Merauke, dan Sorong dapat dikembangkan lebih baik lagi. "Sehingga warga di ketiga provinsi itu merasakan tidak perlu lagi berurbanisasi ke Jakarta karena semua sudah ada di masing-masing provinsi," ujar Nirwono.

Nirwono menyebut, Jakarta sesungguhnya masih sanggup untuk menjadi ibu kota Indonesia. Asalkan, permasalahan banjir, macet, dan urbanisasi dapat segera dibenahi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Dengan demikian jika hal itu menjadi alasan utama pemindahan ibu kota, hal tersebut menjadi tidak relevan. Sehingga jika itu dilakukan ya, artinya Jakarta masih bisa dibenahi ke depannya," ujar Nirwono.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4), syarat-syarat untuk lokasi baru ibu kota pemerintahan Indonesia telah disepakati. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sedikitnya ada 10 syarat bagi suatu daerah untuk menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.

JK menjelaskan, syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah daripada Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong.

"Belum diputuskan di mananya, karena ada syaratnya lagi, ada 10 syaratnya: harus strategis letaknya di tengah daripada Indonesia, harus penduduknya mempunyai toleransi yang baik, harus bersifat nasional. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," ujarnya.

Komentar 7     

Dapatkan Update Berita Republika

Masukkan Email Anda

Subscribe

[pemindahan ibu kota](#)

[ibu kota dipindah](#)

[ibu kota jakarta](#)

Dana Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bisa untuk Kebutuhan Lain

Kamis 02 Mei 2019 15:17 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Karta Raharja Ucu



Monumen Nasional di Jakarta

Foto: wordpress.com

Besarnya biaya pemindahan ibu kota bisa untuk membayar utang BPJS hingga gaji honorer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemindahan ibu kota membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurutnya, alangkah baiknya uang yang akan dipakai untuk membangun kota itu dipakai untuk kebutuhan lain, seperti melunasi utang BPJS.

"Saya dengar biayanya Rp 400 triliun, bagus pakai bayar utang BPJS *aja* dulu hanya Rp 15 triliun," kata Fahri kepada **Republika.co.id**, Rabu (1/5).

Selain itu dana sebesar itu juga seharusnya bisa dipakai pemerintah untuk menaikkan honorer guru dan pembayaran gaji yang menunggak. Tidak hanya itu, ia menambahkan, pemberian subsidi kepada petani dan industri kecil dinilai lebih penting dari sekedar memindahkan ibu kota.

"Rakyat perlu pelayanan dasar bukan ibu kota," tegasnya.

Menurutnya rencana pemindahan ibu kota tersebut membuktikan pemerintah tidak serius membenahi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkap, dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu hektare dengan 900 ribu penduduk.

Bambang menjelaskan, ada empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota. Sumber pertama adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pokok, termasuk kantor pemerintahan dan gedung parlemen. Kemudian sumber pembiayaan kedua adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Sumber dana ketiga, ujar Bambang, adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan melibatkan pemerintah dan swasta sekaligus. KPBU nantinya akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Sementara sumber dana keempat adalah pembiayaan dari swasta murni, termasuk pembangunan properti, perumahan, dan fasilitas sosial.

"Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN dan swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk KPBU," kata Bambang usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4).



Dapatkan Update Berita Republika

Masukkan Email Anda

[ibu kota pindah](#) [pemindahan ibu kota](#) [fahri hamzah](#)

Darmin: Pemindahan Ibu Kota Masih Tahap Evaluasi

Kamis 02 Mei 2019 18:11 WIB
Rep: Retno Wulandhari/ Red: Friska Yolanda



Menko Perekonomian Darmin Nasution

Foto: Biro Humas Kemenko Perekonomian

Pemindahan ibu kota ini pun banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah serius merealisasikan wacana pemindahan ibukota. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini rencana pemindahan ibukota masih dalam tahap evaluasi.

Menurut Darmin, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dijadikan lokasi ibukota baru. "Kan belum diputuskan di mananya, tunggu aja dulu," kata Darmin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/5).

Baca Juga

Pemindahan Ibu Kota, Moeldoko: Tunggu Kajian Bappenas

Kemenkeu Belum Siapkan Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota

Ibu Kota Baru: Saat Daerah Berebut Jadi Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ini pun banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemindahan ibu kota ini akan menimbulkan sejumlah dampak.

Menurutnya, pemindahan ibu kota ini akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, total biaya pembangunan ibu kota baru ini akan memakan anggaran Rp 466 triliun. Bhima memperkirakan akan terjadi pembengkakan biaya akibat spekulasi tanah.

"Biaya pembebasan lahan mahal karena ulah spekulasi tanah. Biaya lain misalnya force majeure karena krisis harus dimasukkan," kata Bhima.

Bhima mencontohkan yang terjadi pada pembangunan pusat pemerintahan Putrajaya di Malaysia. Saat pembangunan Putrajaya, sempat terjadi pembengkakan dana karena krisis finansial 1998. Konsekuensi dari mahalnya biaya itu akan menambah defisit APBN dan utang pemerintah, sehingga tidak feasible secara ekonomi.

Selain itu, menurut Bhima, pemindahan ibukota ini tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan. Pasalnya, jumlah kendaraan dinas yang berkurang tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga. Total kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta unit sedangkan kendaraan dinas hanya 140 ribu unit.

"Apakah berpindahnya para pns kementerian keluar jakarta signifikan kurangi kemacetan? Jawabannya tidak sama sekali," tutur Bhima.

Bhima menegaskan, pemindahan ibu kota justru menimbulkan inflasi karena arus urbanisasi ke tempat baru menaikkan harga kebutuhan pokok. Ketimpangan di ibu kota baru akan semakin melebar imbas dari pendatang yang lebih mampu secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk lokal yang miskin.

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republik

Masukkan Email Anda

Subscribe

ibu kota pindah

perpindahan ibu kota

pemindahan ibu kota

Keinginan untuk memindahkan ibukota ini sejatinya bukan pertama kali muncul di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wacana ini sudah pernah muncul di era pemerintahan sebelumnya mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Ibu Kota Baru: Di Mana Lahan yang Sudah Disiapkan Itu?

Sabtu 04 May 2019 08:57 WIB

Rep: SAPTO ANDIKA CANDRA, RETNO WULANDARI/ Red: Elba Damhuri



Ilustrasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Foto: mg0107

Pemerintah sudah menyiapkan lahan pemindahan ibu kota baru seluas 300 ribu hektare.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terus mematangkan rencana **pemindahan ibu kota**. Sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir April, ibu kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin mengatakan, pemindahan ibu kota bakal dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Akan kita cantumkan di RPJMN 2020-2024," kata Imron melalui pesan singkat kepada *Republika*, Jumat (3/5).

Imron menolak berkomentar lebih jauh ketika ditanyakan hal lain seputar pemindahan ibu kota. Pejabat lain di Bappenas juga bersikap serupa.

Jika memilih rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disampaikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Surabaya, awal April, ada lima tema yang menjadi fokus pembangunan pemerintah selama periode RPJMN tersebut.

Kelima tema itu adalah pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, pertahanan, serta keamanan. Dalam hal fokus pembangunan kewilayahan, Bappenas mencantumkan tiga poin, yaitu sentra-sentra pertumbuhan, komunitas unggulan daerah, dan pertumbuhan perkotaan.

Sementara itu, terkait isu strategis kewilayahan, Bappenas menyoroti soal pengelolaan urbanisasi. Penduduk perkotaan diperkirakan bakal mencapai 60 persen. Sementara, kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional rendah.

Setiap 1 persen urbanisasi hanya menghasilkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar empat persen. Padahal, di negara lainnya, seperti di India, bisa mencapai 13 persen.

Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu hingga 10 tahun dan dimulai paling cepat pada 2020.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djallil mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan 300 hektare lahan di luar Pulau Jawa untuk membangun ibu kota baru. Kendati demikian, Sofyan menutup rapat-rapat letak lahan tersebut.

Sofyan menjelaskan, pemerintah sengaja tidak membocorkan lokasi pasti ibu kota pemerintahan agar tidak terjadi lonjakan harga tanah oleh spekulan. "Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada lahannya, sudah disiapkan," ujar Sofyan di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Sofyan menambahkan, lahan seluas 300 hektare di luar Pulau Jawa disiapkan tanpa mengesampingkan pembangunan taman-taman kota. Menurut dia, ibu kota pemerintahan yang baru akan dilengkapi taman kota yang luas.

Pemerintah memiliki dua skema pemindahan ibu kota. Skema pertama, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 40 ribu hektare dengan total jumlah penduduk 1,5 juta orang dengan kebutuhan biaya berkisar Rp 466 triliun.

Skema kedua, ibu kota dibangun di atas lahan 30 ribu hektare dengan total penduduk sebesar 870 ribu orang dengan asumsi biaya yang dibutuhkan berkisar Rp 323 triliun.

Berkelanjutan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pemerintah perlu memastikan kajian pemindahan ibu kota secara detail yang meliputi kepastian pengembangan ekonomi ibu kota baru, struktur anggaran, pembangunan infrastruktur, kepastian politik, hingga harmonisasi regulasi terkait daerah dan pusat. RPJMN sifatnya masih bisa berubah kapan pun, jadi statusnya belum bisa tetap," kata Adi.

Menurut dia, wacana pemindahan ibu kota oleh pemerintah belum masuk dalam tahapan pembahasan detail. Padahal, ia menambahkan, pemindahan ibu kota bukan hal mudah dan harus dipastikan dapat berkelanjutan meski pemerintahan dan iklim politik berganti.

Lawan politik pemerintah dianggap perlu memiliki komitmen serupa. Artinya, kata dia, pemerintah perlu merangkul seluruh elemen, baik dari lingkup legislatif, daerah, hingga eksekutif untuk mengkaji secara detail skema perpindahan yang akan dilakukan.

Terjaminnya payung hukum bagi para pelaku usaha juga harus menjadi pertimbangan penting. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengingatkan pemindahan ibu kota jangan sampai merugikan banyak pihak.

Hariyadi mengatakan, pemindahan ibu kota akan berlangsung dalam jangka panjang dan tak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan. "Jangan sampai tidak ada payung hukum kuat dan apabila ada pergantian presiden lima tahun lagi tidak jalan. Akibatnya, merugikan kita semua," ujar Hariyadi.

Ia mengakui wacana pemindahan ibu kota ke luar Jawa akan mendatangkan banyak manfaat, salah satunya pemerataan kue ekonomi. "Pertumbuhan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa."

(imas damayanti ed: satria kartika yudha)

Komentar 4



Dapatkan Update Berita Republik
Masukan Email Anda

[ibu kota](#) [pemindahan ibu kota](#) [ibu kota baru](#)

Fahri Usul Ibu Kota Dipindah ke Pulau Seribu

Senin 06 Mei 2019 19:51 WIB

Repr: Dessy Suclati Saputri/ Red: Andri Saubani



Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah.

Foto: Antara/Akbar Tado

Menurut Fahri, pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan dengan konsep maritim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat pemerintah tak perlu memindahkan Ibu Kota DKI Jakarta hingga ke luar Pulau Jawa. Menurutnya, pemerintah cukup memindahkan ibu kota ke daerah di sekitar Pulau Seribu dengan mengusung konsep maritim.

"Usul saya mumpung ini ada konsep maritim, *pindahin aja* ke pinggir dekat-dekat Pulau Seribu," kata Fahri usai buka bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).

Baca Juga

Buka Bersama, Jokowi Singgung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Dibahas Serius 3 Tahun Terakhir

Menurutnya, konsep maritim merupakan konsep yang tepat mengingat saat ini pemerintah juga menggunakan konsep negara maritim untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, masih ada tanah reklamasi di Teluk Jakarta yang bermasalah dan belum diselesaikan.

Ia berpendapat, pemerintah perlu menyelesaikan tanah reklamasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bagian dari pengembangan wilayah baru. Tak hanya itu, pemilihan daerah yang dekat dengan Jakarta juga dinilainya dapat menghemat biaya pembangunan.

"Saya mengusulkan agar dipilihlah seperti Pulau Seribu. Itu lebih masuk akal karena kita mau mendalami konsepsi negara maritim *kan*. Jadi lebih bagus kalau kita memakai kepulauan sebagai konsep ibu kota kita," ujar dia.

Selain itu, Fahri menilai tak perlu menggunakan istilah pemindahan ibu kota namun cukup menyebutnya sebagai kantor pemerintahan baru. Ia pun mencontohkan Malaysia yang juga melakukan hal serupa dengan memindahkan kantor pemerintahannya ke Putrajaya.

Fahri juga menyebut, konsep pembangunan DKI Jakarta oleh Soekarno ini mengikuti konsep pembangunan di Washington DC, Amerika Serikat. "Makanya kalau kita membaca luas distrik Kolombia itu *kan* cuma 16x10 km. Dan kalau kita tarik dari gedung DPR sampai ke sini *kan* lebih kurang sekitar 10 km. Jadi sebenarnya *kan* sudah merupakan konsep Bung Karno mengenai ibu kota. Apalagi yang mau kita ubah?" katanya.

Dalam acara berbuka puasa bersama para pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta sore ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru. Ia juga berjanji akan segera memutuskan rencana ini dan akan berkonsultasi dengan berbagai pimpinan lembaga terkait.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga daerah alternatif sebagai lokasi ibu kota baru. Kendati demikian, hingga kini pemerintah belum memutuskan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.

Komentar 2



Dapatkan Update Berita Republika

Masukkan Email Anda

Subscribe

pemindahan ibu kota | jokowi | fahri hamzah

Presiden: Infrastruktur Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota

Selasa 07 Mei 2019 17:17 WIB
Red: Ratna Puspita



Joko Widodo

Foto: Antara/Wahyu Putra A

Kaltim memiliki infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

REPUBLIKA.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA -- Presiden RI Joko Widodo menilai kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini berada di Jakarta meski masih perlu kajian dari aspek lainnya. Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5).

Baca Juga

TKN: Pemuda Salah Satu Faktor Kemenangan Jokowi-Maruf

Ditanya Apakah Besok Penuhi Panggilan KPK? Menag: Insyaallah

ISIS Lakukan Serangan di Kirkuk

Sumber: Antara

Komentar 0     

Dapatkan Update Berita Republik

Masukkan Email Anda

Subscribe

[pemindahan ibu kota](#) [dki jakarta](#) [joko widodo](#) [kalimantan timur](#)

Namun, kata Presiden, kajian tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosilogisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam. "Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya," katanya.

Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota. Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," katanya.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya.

Ia menyebutkan ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini distudi. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur. Semua fasilitas yang ada di daerah itu, menurut Presiden, sangat mendukung pemindahan Ibu Kota, antara lain, berada di tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan.

Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi. Menurut Presiden, semua masih dikalkulasi atau dihitung.

"Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. "Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar," katanya.

Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. "Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," katanya.

Jokowi: Kaltim Potensial Jadi Ibu Kota Baru, Tapi ...

Rabu 08 Mei 2019 06:12 WIB
Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Hasanul Rizqa



Ilustrasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Foto: mgro/01

Jokowi belum memastikan Bukit Soeharto sebagai kandidat terkuat ibu kota baru.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Kalimantan Timur sebagai daerah dengan lokasi yang cukup ideal untuk dijadikan ibu kota baru Indonesia. Lokasi yang dimaksud ialah Bukit Soeharto, terletak di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Negara menilai, lokasi tersebut memiliki nilai lebih karena diapit dua kota besar di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Balikpapan dan Samarinda. Artinya, infrastruktur dasar yang diperlukan bagi suatu ibu kota baru dapat dikatakan cukup memadai. Misalnya, fasilitas strategis seperti bandara atau pelabuhan. Belum lagi, menurut Jokowi, jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Samarinda tak lama lagi rampung.

Baca Juga

Mampir di Metos Palangkaraya, Jokowi Sapa Warga

Situng KPU Telah Capai 70 Persen, Jokowi-Maruf Unggul

Jokowi Tinjau Kandidat Ibu Kota RI Bukit Soeharto di Kaltim

Meski memiliki berbagai kelebihan, Presiden belum memastikan Bukit Soeharto sebagai kandidat terkuat ibu kota baru. Dia menilai, masih banyak aspek selain ketersediaan infrastruktur yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ibu kota baru.

"Banyak aspek yang lain yang harus dihitung dikalkulasi mengenai keluasan lahan, kedekatan dengan pantai, sumber air bakunya seperti apa, topografi cocok atau tidak. Banyak sekali jadi bukan hanya masalah infrastruktur," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan kunjungan ke Kaltim, Presiden nantinya melanjutkan peninjauan kandidat lainnya sebagai lokasi ibu kota baru. Daerah yang dimaksud ialah Kalimantan Tengah.

Ada empat lokasi yang akan ditinjaunya, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. "Di Kalteng sudah ditunjukkan oleh Pak Gubernur. Di sini ada 300 ribu hektare. Kalau kurang ditambah di sini (lokasi lain) masih 60 ribu hektare. Di sini memang lahannya sangat luas sekali," papar Jokowi kepada awak media di Palangkaraya.

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republika

Masukan Email Anda

Subscribe

perpindahan ibu kota ibu kota pindah jokowi

Luhut: Biaya Bangun Ibu Kota Baru Rp 466 Triliun

Kamis 09 May 2019 08:45 WIB
Red: Teguh Firmansyah



Presiden Jokowi meninjau lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5).

Foto: Republika/Septo Andika Candra

Biaya pembangunan ibu kota baru tak sepenuhnya dibiaya APBN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemindahan ibu kota memerlukan investasi sekitar Rp 466 triliun. Jumlah itu, kata ia, nantinya tidak sepenuhnya ditanggung negara melainkan juga melibatkan banyak pihak termasuk investor.

Baca Juga

[Pemindahan Ibu Kota dan Feeling Presiden Jokowi](#)

[Presiden: Luas Lahan Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota](#)

[Rencana Pemindahan Ibu Kota Contoh Jokowi Bangun Negara](#)

"Memang sebenarnya kalau kita lihat, bikin ibu kota baru itu *kan* kira-kira Rp 400-an triliun. Rp 400-an triliun itu tidak semua dibebankan kepada APBN. Sebagian dari pemerintah, sebagian lagi dari swasta yang nanti mengelola. Ini jadi stimulus ekonomi juga," jelasnya.

Anggaran pemindahan ibu kota itu, lanjut Luhut, lebih rendah dari permintaan Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan anggaran Rp 571 triliun untuk memperbaiki ibu kota. Anggaran pemindahan ibu kota masih lebih rendah dan tidak membebani APBN sepenuhnya.

Luhut menambahkan, investasi pemindahan ibu kota juga akan dilakukan dalam kontrak tahun jamak. Studi yang mendalam dan komprehensif saat ini tengah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Studinya dilakukan sangat komprehensif sekali, jadi bukan studi asal saja," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan, pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Rencana tersebut bahkan telah dibahas sejak tiga tahun lalu di kalangan internal. Selama 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan atas rencana tersebut.

Menurut Jokowi, Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air. Sementara pulau-pulau lain banyak yang masih kosong sehingga perlu dipertimbangkan upaya untuk memindahkan ibu kota.

Sumber : Antara

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republika

[pemindahan ibu kota](#) [ibu kota dipindah](#) [ibu kota jakarta](#)



Bappenas: Tahun 2024 Pusat Pemerintahan tak Lagi di Jakarta

Senin 13 Mei 2019 13:17 WIB
Repr: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya



Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4).

Foto: dok. Humas Bappenas

Jokowi sudah meninjau dua lokasi yang dicalonkan jadi ibu kota baru pemerintahan RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan proses pemindahan pemerintahan ke ibu kota baru bisa dimulai tahun 2024 mendatang. Sementara pengerjaan fisiknya, sudah dimulai sejak 2022, terutama infrastruktur dasar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, garis waktu pembangunan ibu kota baru sendiri sudah dimulai sejak 2019 ini.

Baca Juga

[Soal Pemindahan Ibu Kota Negara](#)

[Bappenas Gaet ADB untuk Atasi Sampah Laut](#)

[Ekspor Negatif, Bappenas: Kita Sulit Cari Sektor Unggulan](#)

Urutan *timeline*-nya, kajian teknis rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum apa yang akan melandasi pemindahan ibu kota pemerintahan, hingga awal 2020. Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar.

"Tahun 2022-2024, pembangunan konstruksi dimulai," jelas Bambang dalam diskusi yang digelar oleh Kantor Staf Presiden, Senin (13/5).

Pemerintah, ujar Bambang, juga akan menyiapkan fasilitas penunjang bagi warga ibu kota baru, seperti perumahan dan kebutuhan komersial lainnya. Ditargetkan, per 2024 sudah ada proses pemindahan pemerintahan, entah sekaligus atau bertahap.

Bappenas mengusulkan, seluruh proses pemindahan ibu kota ditangani oleh satu badan otoritas. Badan ini masih dibahas di level kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bambang menyebutkan, badan otoritas yang menangani pemindahan ibu kota harus memiliki kekuatan hukum dan fleksibilitas dalam menangani masalah.

Sebagai informasi, Bappenas saat ini sudah memegang desain ibu kota baru yang komprehensif, termasuk kawasan inti pemerintahan seluas 2 ribu hektare dan kawasan perkotaan seluas 40 ribu hektare. Soal lokasi, Bambang menegaskan bahwa pemerintah tidak ada membocorkannya demi mencegah lonjakan harga oleh spekulasi.

Presiden Jokowi sudah meninjau dua lokasi yang dicalonkan jadi ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Bukit Nyuling di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republik

[ibu kota baru](#) [pemindahan ibukota negara](#) [kajian bappenas](#)

Pemerintah Awasi Harga Tanah di Area Calon Ibu Kota Baru

Selasa 14 Mei 2019 14:07 WIB
Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda



Ilustrasi Ibukota Pindah

Foto: Republika/Mardiah

Pemerintah belum mengumumkan lokasi calon ibu kota baru untuk cegah spekulasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergerakan harga tanah di wilayah yang menjadi pilihan ibu kota baru ikut menjadi pengawasan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama kementerian dan lembaga terkait. Hukum penawaran dan permintaan tanah di daerah yang bakal menjadi calon ibu kota baru dipastikan terjadi, namun pemerintah siap memperketat pengawasan.

"Sebetulnya (harga) ini bukan hanya tergantung pada jumlah si pembeli, tapi perilaku penjual juga. Jadi silakan saja, tapi pemerintah tetap akan bekerja sesuai kaidah yang ada," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian ATR, Horison Mocodompis saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (14/5).

Baca Juga

Pemindahan Ibu Kota Dinilai Butuh Penguatan Legislasi

Pemindahan Ibu Kota Dinilai akan Dorong Permintaan Hunian

Pemindahan Ibu Kota, Konsumen Cari Properti di Palangkaraya

Horison mengatakan, sementara ini, pemerintah belum mengumumkan secara spesifik lokasi pemindahan ibu kota juga dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak spekulasi tanah. Ia menegaskan, tanah yang bakal digunakan merupakan tanah milik negara sehingga persoalan harga dipastikan tidak menjadi hambatan.

Akan tetapi, mengenai pembangunan lainnya yang bakal menjadi pelengkap dari ibu kota, belum ditentukan lebih lanjut. Kementerian ATR, jelas dia, sejatinya diberi tugas utama untuk mencari tanah yang memang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat mesti bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk pengawasan harga.

Sebab, pemerintah daerah menjadi pihak yang mengetahui segala transaksi jual beli tanah setempat. Sementara, Kementerian ATR lebih kepada pendataan tanah yang didaftarkan oleh para pemilik. "Ini akan melibatkan banyak pihak. Pemda juga menjadi pihak yang paling tahu soal itu (harga)," tutur dia.

Sementara ini, Horison mengaku, belum terdapat laporan dan Badan Pertanahan Nasional daerah setempat terkait adanya pergerakan kenaikan harga tanah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait agar kebijakan pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara kondusif tanpa masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah.

Sebagaimana diketahui, rencana pemindahan ibu kota mulai berdampak langsung kepada perilaku masyarakat dalam mencari properti. Meski lokasi pemindahan ibu kota belum ditetapkan, konsumen properti seketika tertuju pada lokasi potensial untuk mempelajari kondisi harga properti setempat.

Hal itu terlihat dari hasil riset platform jual-beli online, OLX yang menyebutkan, pencarian properti di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah naik lima kali lipat. Dari hanya 314 kali pada 25 April 2019 menjadi 1.500 kali pencarian pada 30 April 2019. Tanggal itu tepat satu hari setelah Rapat Terbatas Pemindahan Ibu Kota digelar di Istana Merdeka dan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

"Kota Palangkaraya belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Tapi trafik pencarian properti tertinggi di Pulau Kalimantan ada di Palangkaraya. Sudah ada pergerakan pencarian properti," kata Ignasius.

Adapun provinsi yang saat ini menjadi pilihan pembangunan ibu kota baru yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.

Ignasius mengatakan, perhatian masyarakat terkait pemindahan ibu kota saat ini mulai mengerucut kepada tiga titik. Yakni Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah, serta kawasan segitiga Palangkaraya, Gunung Mas, dan Katingan di Kalimantan Tengah.

Ke depan, Ignasius mengatakan, OLX masih perlu mendalami tiga hal berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota. Pertama, yakni harga tanah. Menurutnya, pergerakan harga tanah perlu dipantau karena pembangunan ibu kota setidaknya membutuhkan dua hal. Yakni infrastruktur baru dan ketersediaan luasan tanah untuk menampung penduduk baru.

Kedua, harga mobil. Ignasius mengatakan, data internal OLX menunjukkan kepemilikan mobil di Palangkaraya hanya 110 ribu mobil. Sementara, pemindahan ibu kota yang diperkirakan akan ikut memindahkan 15 juta penduduk secara otomatis akan meningkatkan permintaan mobil.

"Artinya akan ada permintaan yang sangat masif untuk mobil, walaupun tidak semua orang butuh mobil," kata dia.

Ketiga, yakni kondisi harga tanah dan properti di Jakarta dan sekitarnya. Secara hukum ekonomi, Ignasius menyampaikan, pemindahan ibu kota akan mendorong sebagian masyarakat untuk menjual aset propertinya di Jakarta. Ketika itu terjadi, secara normal bakal terjadi koreksi harga pasar. Meski begitu, Ignasius mengatakan, hal itu harus dialami untuk waktu jangka panjang.

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republika

Masukkan Email Anda

Subscribe

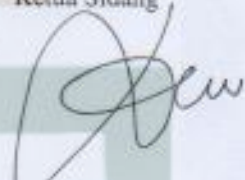
[ibu kota pindah](#) [perpindahan ibu kota](#) [pemindahan ibu kota](#) [spekulasi tanah](#)



Biodata Mahasiswa

NIM : 11730025
Nama : SRI EKA NOVI ASTUTY
Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 22 November 1993
Alamat : Jalan Sulawesi Utara RT 29 RW 05 RT.29 RW.05,
PLANDI, Jombang, KAB. JOMBANG, JAWA TIMUR
No Handphone : 081271917457
Email : SENASTUTY@GMAIL.COM
Nilai ICT : 83,75 (12 Juni 2019)
Nilai Toec : 427 (21 Juni 2019)
Nilai Ikla : 323 (28 Mei 2019)
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2019
Ketua Sidang : Lukman Nusa, M.I.Kom.
Pembimbing : Lukman Nusa, M.I.Kom.
Penguji : Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I, M.A.
Fajar Iqbal, S.Sos., M.Si
Tugas Akhir dengan judul : PEMBINGKAIAN BERITA PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA DI MEDIA
ONLINE (Analisis di Detik.com dan Republika.co.id Periode 1-14 Mei 2019)

Yogyakarta, 26 Juli 2019
Ketua Sidang


Lukman Nusa, M.I.Kom.
19861221 201503 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI EKA NOVI ASTUTY

Tempat Lahir : Kebumen

Tanggal Lahir : 22 November 1993

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Public Relation*

Email : senastuty@gmail.com

Alamat : Jalan Sulawesi Utara, RT/RW 29/005, Plandi, Jombang

PENDIDIKAN

1999-2005 : SD N 1 Bonorowo

2005-2006 : SMP N 1 Prembun

2006-2008 : SMP N 6 Jember

2008-2011 : SMA N 1 Prembun

PENGALAMAN KERJA

2014-2016 : Freelance Sales Promotion Girl di Dazzle Aksesoris

2015 : Magang Kerja Account Development di Local Tobacco Agency

2016-2018 : Freelance Tour Leader di Langen Mulyo Tour and Travel

2017-2018 : Asisten Manager Noice Kafe